

Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas

Idjang Tjarsono*

Abstract

This paper will discuss the Pancasila is a comfortable space for the development of unity in diversity as the basis of national identity awareness will thrive indoors Pancasila. Therefore, the Pancasila and Unity in Diversity is kondusif atmosphere for the development of democracy in Indonesia. Democracy is not the cultural nuances of the implementation of democratic ideology therefore be associated with the positive law of a State, as a product of cultural values. Pancasila as a set of cultural values of the nation, is a special distinction (diferentia specifica) with another democracy.

Keywords: *Pancasila, Unity in Diversity, Democracy, Ideology.*

Pendahuluan

Prematurkah Demokrasi di Indonesia

Predikat demokrasi identik dengan konotasi modern, oleh karenanya suatu negara akan menjadi bangga jika negaranya telah menggunakan predikat demokrasi. Demokrasi merupakan produk peradaban, dan peradaban merupakan produk basis kesadaran identitas suatu bangsa. Dari hipotesa ini maka saya tertarik untuk mengajukan dua pertanyaan:

Pertama, apakah peradaban yang kita miliki telah mampu melahirkan sikap demokratis? Hal ini mengingat bahwa peradaban yang modernlah yang melahirkan sikap demokratis, dan bukan sebaliknya. Modern, dalam hal ini merujuk pada pola pikir rasional, (bukan emosional dan bukan primordial) sebagai konsekuensi logis kondisi pendidikan yang berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat. Sehingga tidak heran jika ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi baru bisa terlaksana dengan baik jika minimal *income*-perkapita masyarakatnya 3500 US dollar.

Kedua, apakah demokrasi yang baik harus seperti yang berlaku di Negara Eropa Barat atau Amerika? Peradaban sebagai embrio lahirnya demokrasi merupakan cerminan dari basis kesadaran identitas suatu komunitas (bangsa). Oleh karenanya demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, oleh karenanya demokrasi yang baik harus

* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

merujuk pada nilai-nilai yang berkembang pada bangsa yang bersangkutan, bukan merujuk pada negara lain

Basis kesadaran identitas sebagai embrio lahirnya peradaban, sedangkan jika kita melihat basis kesadaran identitas bangsa Barat (AS dan Eropa Barat) sangatlah jelas perbedaannya, Negara Barat: individualis, humanis, sekuler, sedangkan masyarakat Indonesia: individu-sosial, humanis-religious, agamis. Sehingga sangatlah wajar jika pada tataran implementasinya demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, karena memang basis kesadaran identitas keduanya sangatlah berbeda.

Sebagai basis kesadaran identitas suatu bangsa (individualis-sosialis, humanis-religious, agamis) memang tetap sifatnya, namun pemahaman dan implementasinya yang senantiasa harus dinamis, dari sinilah akan muncul konotasi *primitive* dan modern. Istilah *primitive* dan modern sama sekali bukan mengindikasikan baik-buruk, atau maju tertinggalnya, hanya saja perilaku demokratis adalah produk peradaban modern.

Konsep Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat (*demos* dan *kratos*). Sebagai konsep demokrasi berlaku umum, dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi bukan harus seperti yang berkembang di Barat. Untuk Indonesia, maka demokrasinya adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai *way of life*, merujuk pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mengembangkan transparansi, toleransi, damai, teratur dan sebagai *way of life* demokrasi menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi dalam menentukan kebijakan negara dan kesemua ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi adalah nuansanya budaya, oleh karenanya budaya Barat yang berintikan, pada basis kesadaran identitasnya adalah monism (individualis), sekuler, antroposentris, yang pada gilirannya melahirkan sistem demokrasi liberal tentu akan berbeda dengan Indonesia (demokrasi Pancasila), dimana budayanya berbasiskan pada

kesadaran identitas monopluarisme (individu-social, jasmani-rokhani, makhluk pribadi-makhluk Tuhan), religious, theologies.

Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada basis kesadaran identitas bangsa Indonesia, yang tidak semata-mata rational tetapi juga religious, yang tidak hanya mementingkan kepentingan individu melainkan juga social, yang tidak hanya bersifat kuantitatif (majority) melainkan juga kualitatif (kebijaksanaan-wisdom).

Dalam sejarah perkembangannya, sistem pemerintahan jika dilihat dari pemegang kekuasaan, meliputi Monarkhi (kekuasaan dipegang oleh satu orang, yakni: raja) maka cenderung melahirkan tirani, selanjutnya Aristokrasi (kekuasaan dipegang oleh beberapa orang) dikawatirkan melahirkan oligarkhi, kemudian demokrasi (kekuasaan dipegang oleh banyak orang, yakni: rakyat) dan sistem inipun jika tidak dikelola dengan baik akan melahirkan anarkhis. Namun dalam sistem demokrasi telah ada pembagian kekuasaan, sehingga akan terjadi saling mengawasi. Hal inilah yang dijadikan alasan bahwa demokrasi paling relevan untuk mengelola sistem pemerintahan modern. Sehingga sejak pasca Perang Dunia Ke II berbondong-bondong negara-negara di dunia memproklamirkan dirinya sebagai negara demokrasi, yang seringkali sekedar untuk merubah *image* dari negara *primitive* menjadi negara modern.

Demokrasi adalah sarana (alat) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi obyektif masyarakat dimana alat tersebut digunakan dan siapa yang menggunakan alat tersebut (pemangku kekuasaan). Dengan kata lain demokrasi yang efektif dan produktif memerlukan prakondisi, baik dari pendidikan, ekonomi maupun budaya (penghargaan hak dan kewajiban). Demokrasi sangat erat dengan hak asasi manusia, karena itu demokrasi tidak akan bernilai apa-apa tanpa dijiwai oleh HAM. Orientasi tentang hak asasi manusia, sangat dipengaruhi konsep tentang manusia itu sendiri, sehingga hak asasi manusia menurut komunis, liberalis dan Pancasila tentu akan berbeda-beda karena memang konsep manusianya berbeda-beda diantara mereka.

Demokrasi sebagai produk peradaban dan peradaban sebagai produk kesadaran basis identitas suatu bangsa, maka tidaklah mungkin jika Indonesia mempraktekkan sistem pemerintahan (demokrasi) dengan meniru demokrasi Barat (Liberal). Walaupun diantara negara penganut demokrasi memiliki satu persamaan, yakni sumber legitimasi kekuasaan

berasal dari rakyat, yang sekaligus sebagai ciri pembeda (*diferentia specipica*) dengan sistem monarki.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila dibawahnya. Dengan jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif.

Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat kuantitatif, *majority*, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang, sedangkan pada demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (*musyawarah-mufakat*) baru melalui voting (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana. Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigme bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.

Esensi Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius (*humanism-religious*), bukan kemanusiaan yang sekuler, oleh karena itu ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-mata rasional melainkan juga religiusitas. Secara prinsip demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan Rakyat (ps.1 ayat 2 UUD 1945) sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah sila ke 4 Pancasila.

Berkaitan dengan kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila, maka kebebasan bukan sekedar kebebasan melainkan harus diikuti rasa tanggungjawab atas

penggunaan kebebasan tersebut, disinilah ciri demokrasi Pancasila bahwa tanggungjawab tidak sekedar bersifat horizontal (sesama manusia) melainkan juga secara vertikal (tehadap sang Pencipta) yang diartikan sebagai *humanism-religious*. Demikian juga perbedaan pendapat adalah wajar dalam demokrasi Pancasila, namun penyelesaiannya harus merujuk pada sila ketiga Persatuan Indonesia.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Pancasila sebagai struktur kognitif

Setiap bangsa memerlukan nilai-nilai, norma-norma yang diyakininya mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuangkan cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam memotivasi kebersamaan dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, jawabannya adalah Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara telah terbukti memenuhi tuntutan kodrat bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Sebagai struktur kognitif, Pancasila berisi pengetahuan tentang norma-norma mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan Pancasila, karena didalamnya terkandung cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan serta memberikan orientasi tentang dunia seisinya, memberikan arahan bagi kehidupan yang berjuang melawan berbagai bentuk penderitaan.

Pancasila berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan NKRI maupun dalam proses pencapaian tujuan NKRI. Hal ini berarti tujuan negara yang dirumuskan sebagai “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, mutlak harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Secara historis fungsi dan peran Pancasila, mengalami tahapan-tahapan dan setiap tahapan masing-masing mencerminkan lingkup permasalahan yang berbeda, sehingga menuntut visi yang khas pula. (Soeryanto Poespowardoyo,1991)

Tahapan pertama, Pancasila sebagai ideologi pemersatu, dan telah menunjukkan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan kehidupan serta penyelenggaraan

negara RI, Pancasila merupakan filsafat politik. Rakyat Indonesia telah dibangun dengan kesadaran yang kuat sebagai bangsa yang memiliki identitas dan hidup bersatu dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Namun dalam tahapan tersebut, terlihat adanya kelemahan persepsi maka dalam periode ini kemiskinan yang cukup parah tidak mendapat perhatian yang sewajarnya, dan kurang dalam penanggulangnya. Sehingga memberi kesempatan pada fihak-fihak lain yang mencari keutungan kelompoknya, seperti munculnya pemberontakan-pemberontakan.

Tahapan kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan, namun bukan berarti menegasikan tahap sebelumnya, sehingga pada tahap ke dua ini, rasa persatuan tetap harus dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahap ini timbul kesadaran bahwa ekonomi perlu ditangani dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa, dan membangun bangsa berarti memerangi kemiskinan. Dan langkah tersebut memerlukan stabilitas politik sebagai prasaratnya, maka keamanan menjadi tolok ukur untuk memberi peluang pembenahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Dan kesemuanya itu menuntut adanya legitimasi kekuasaan yang memberikan kewenangan yang pasti bagi pemerintah untuk mengambil langkah serta kebijakan dalam mewujudkan cita-cita yang telah disepakati bersama.

Namun pada tahapan ini, kurang adanya kepekaan sosial, sehingga masalah-masalah sosial tidak dilihat secara realistis dan kurang dibahas secara kritis, dan semata-mata secara ideologis. Pancasila menjadi alat pragmatism untuk semata-mata membuat legitimasi diri.

Tahapan ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka (tanpa menghilangkan tahapan sebelumnya), tahapan ini memberikan orientasi kedepan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi. Pengaruh negatif globalisasi bisa diatasi dengan tetap mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan nasional yang dinamis. Terbuka, bukan berarti merubah nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit sehingga mampu memecahkan permasalahan. Perubahan hanya dimungkinkan pada tataran nilai instrumental dan nilai operasional.

Mengingat nilai-nilai tersebut masih bersifat umum, abstrak maka agar lebih mudah dilaksanakan langkah pertama adalah konkritisasi nilai-nilai diatas, dengan mengacu pada 3 pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan teleologis, yakni pendekatan yang diarahkan pada apa tujuan kehidupan berbangsa, bernegara ini, artinya tujuan yang kita sepakati (tercermin dalam Pembukaan UUD 1945) haruslah tidak bertentangan atau sejalan dan mencerminkan norm-norm sebagai hasil konkritisasi dari nilai-nilai yang dimaksud diatas.
- b. Pendekatan etis, yakni pendekatan yang diarahkan pada ukuran baik-buruk, apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk menurut nilai-nilai yang dimaksud diatas. (pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan).
- c. Pendekatan integratif yakni bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai bagian dari sistem bangsa maupun negara, apakah lebih mengutamakan kepentingan negara dan bangsa atau kepentingan pribadi. Menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya, manusia adalah pribadi, namun juga merupakan relasi.

Dalam rangka menggunakan ketiga pendekatan tersebut, senantiasa berpijak pada kondisi obyektif yakni bentuk wilayah (kepulauan) dan kondisi bangsa Indonesia (heterogen). Dengan demikian pada saat kita menentukan tujuan berbangsa dan bernegara ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan dan heterogenitas yang ada. Demikian juga saat kita menentukan ukuran benar-salah atau baik-buruk mengacu pada kondisi obyektif masyarakat Indonesia (humanis religius). Selanjutnya bagaimana hubungan antara warga-negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara, tentunya merujuk pada konsep Bhineka Tunggal Ika yang beralaskan konsep kebangsaan kita. (kesatuan wilayah, kesatuan nasib, kesatuan tujuan). Kesemuanya itu baru akan efektif jika didukung oleh aturan yang jelas dan sangsi yang tegas.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila perlu memberikan ruang untuk terciptanya dinamisasi kehidupan masyarakat, demokratisasi, dan fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Reformasi banyak memberikan kehidupan positif bagi survival bangsa Indonesia, namun ada beberapa sisi negatifnya antara lain kesalahan berpikir (paradigma) dalam memaknai reformasi, bahwa reformasi dimaknai hanya sebagai perubahan (change). Lupa bahwa sesungguhnya reformasi sebagai suatu proses, yang dalam proses tersebut selain

harus dilakukan perubahan juga harus dipertahankan suatu keberlanjutan atau kesinambungan. Selain itu, adanya rasa kebencian terhadap perkembangan masa lalu, sehingga muncul anggapan bahwa semua hal yang pernah ada dimasa lalu sudah pasti usang, tidak reformis dan tidak perlu lagi. Kita semua ingat pada masa-masa pasca reformasi, jarang terdengar istilah-istilah seperti stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan, nasioanalisme, bahkan istilah Pancasila dianggap sudah usang, masa lalu sehingga tidak reformis. Kenyataan inilah yang dimaksudkan sebagai fenomena “kesalahan berpikir” yang tanpa disadari banyak dialami oleh masyarakat kita pada masa reformasi sekarang ini.

Dalam Pancasila terkandung 3 klasifikasi nilai, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai operasional. Pada tataran nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, umum, universal, oleh karena itu perlu dikonkritisasi melalui nilai instrumental dan operasional. Nilai instrumental tercermin pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedang nilai operasional, meliputi pelaksanaan obyektif yakni pelaksanaan oleh institusi serta penyelenggara negara dan pelaksanaan subyektif, yakni pelaksanaan oleh warga negara.

Oleh karena itu, jikalau selama ini ada fihak-fihak yang mempertanyakan efektifitas peran Pancasila dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, maka pertanyaan tersebut sebenarnya diarahkan pada nilai instrumental (UU) dan nilai operasional (pelaksana UU), bukan pada nilai dasar Pancasila (kelima sila-silanya). Sehingga kemungkinannya adalah undang-undangnya tidak ada atau tidak mendukung, atau undang-undang sudah mendukung tetapi pelaksanaannya yang kurang tepat.

Sila-sila Pancasila bersifat hirarkhies pyramidal, artinya setiap sila dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila dibawahnya, dengan demikian setiap sila mengandung empat sila lainnya. Contoh: sila ke-2 adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, dan menjiwai sila ke-3, 4 dan sila ke 5. Oleh karena itu, Ketuhanan menurut Pancasila adalah Ketuhanan yang menjiwai sila-2,3,4,5. Makanya, teroris di Indonesia bertentangan dengan sila Pancasila, karena Ketuhanan mereka tidak berperikemanusiaan dan seterusnya.

Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika merupakan esensi wawasan kebangsaan Indonesia, karena Indonesia secara geografis kepulauan dan penduduknya heterogen. Dalam kondisi demikian, pilihan Bhineka Tunggal Ika bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu kebutuhan. Secara sosiologis perbedaan memang potensial untuk terjadinya konflik, walaupun secara filosofis bahwa persatuan yang sinergik, produktif adalah persatuan yang unsur-unsurnya berbeda.

Kelangsungan prinsip Bhineka Tunggal Ika akan tetap eksis sejalan dengan berkembangnya wawasan kebangsaan, yang berbasis pada kesadaran identitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan heterogen penduduknya. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, membawa konsekuensi bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah laut dimana ditengah-tengahnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Oleh karenanya, laut disini bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu, konsekuensi selanjutnya adalah diantara kita hak dan kewajibannya sama. Sehingga, jika salah satu wilayah di salah satu pulau mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka seluruh isi pulau yang lain di Indonesia wajib membelanya. Tetapi juga sebaliknya, jika disalah satu wilayah (pulau) ada rejeki dari Tuhan, ya dibagi-bagi keseluruh pulau yang ada, tentu melalui mekanisme yang legal.

Demikian juga sebagai bangsa yang heterogen, hanya dapat bersatu jika masing-masing pihak menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan dirinya. Oleh karena itu persatuan disini, tidak berarti menghilangkan identitas daerah, dengan kata lain persatuan yang sinergik. Bhineka Tunggal Ika adalah solusi kehidupan modern dalam berbangsa dan bernegara, karena di era globalisasi, dunia menjadi satu sistem sehingga tidak ada satupun negara yang homogen, oleh karenanya faham nasionalisme menjadi kebutuhan. Persatuan adalah kebutuhan bagi negara bangsa, mengingat dampak negatif globalisasi akan menggerogoti kedulatan negara bangsa, dalam hal inilah prinsip Bhineka Tunggal Ika menjadi penting.

Keanekaragaman baru dapat menjadi perekat bangsa bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika:

1. Ada nilai yang berperan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara bangsa menuju tujuan.
3. Mengakui dan menghargai hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai aspek (agama, suku, keturunan, kepercayaan, kedudukan sosial).

4. Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesemuanya diatas, berada dalam sistem nilai Pancasila, oleh karenanya Bhineka Tunggal Ika keberlanjutannya tergantung pada komitmen bangsa terhadap Pancasila.

Disamping beberapa hal tersebut diatas, juga dukungan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi (otonomi) akan memberi ruang yang kondusif bagi perkembangan positif heterogenitas bangsa Indonesia. Tentu perlu adanya pemerintah daerah yang semakin dewasa, dan pemerintah pusat yang berwibawa untuk menjamin stabilitas nasional dan kesatuan bangsa, hubungan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati dalam kelompok sosial.

Heterogenitas (suku, agama, ras) adalah *de facto* sebagai bangsa Indonesia, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah solusi terhadap fakta yang kita hadapi guna mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Embrio Bhineka Tunggal Ika adalah sumpah pemuda 28 Oktober 1928, sedang *causa material* Pancasila adalah budaya, agama, adat istiadat yang berkembang di wilayah nusantara. Oleh karenanya Pancasila adalah ruang untuk berkembangnya heterogenitas, sedang Bhineka Tunggal Ika adalah prinsip-prinsip (komitmen) yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa ini.

Pancasila, sebagai sistem nilai sangat abstrak, oleh karenanya perlu diimplementasikan, dalam kaitan inilah Bhineka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas sebagai bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran Bhineka Tunggal Ika, tidak ada ruang untuk berbuat diskriminasi, karena istilah “IKA” mencerminkan suasana “persamaan”, “kesetaraan” sebagai warga negara, dan Pancasila memfasilitasi suasana tersebut. Sebagai fasilitator Pancasila yang telah diimplementasikan dalam bentuk hukum positif, maka tidak akan berguna tanpa dikawal oleh penegakan hukum.

Persamaan dan kesetaraan, tercermin dalam sistem demokrasi yang kita miliki, yakni demokrasi yang dijiwai oleh sila ke-4 Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). Secara prinsip, demokrasi bukanlah bersifat ideologis sehingga demokrasi tidak harus seperti di Barat, demokrasi nuansanya budaya, oleh karenanya demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Memang “demokrasi” ansich bersifat universal, tetapi pada tataran implementatif maka demokrasi akan terikat oleh kondisi obyektif bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai sistem nilai bangsa, memiliki hak paten untuk

mewarnai demokrasi di Indonesia. Memang demokrasi merupakan alat, oleh karenanya efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh si pengguna alat tersebut.

Jika Pancasila ingin berperan dalam demokrasi di Indonesia, maka Pancasila harus mampu mengatasi masalah-masalah yang menjadi prasarat untuk terlaksananya demokrasi secara baik. Demokrasi, dari kata *demos* dan *kratos*, artinya kedaulatan ditangan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus independen, terlepas dari ketergantungan pihak lain, sehingga jika rakyat masih terikat oleh kemiskinan maka rakyat menjadi tidak independen. Selama rakyat masih terikat oleh kemiskinan, maka selama itu pula demokrasi tidak akan berjalan baik (terjadi politik uang), maka kesejahteraan sebagai salah satu prasarat berlangsungnya demokrasi yang baik. Oleh karena itu “persamaan” dan “kesetaraan” (IKA) lebih diarahkan pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang *humanism religious* (Pancasila). Pancasila baik sebagai sarana maupun sebagai tujuan bangsa Indonesia, pada dasarnya ingin mencapai suatu kondisi yang mencerminkan suasana *humanisme religious*.

Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, hal ini bermakna bahwa demokrasi Pancasila senantiasa sejalan dengan hukum positif yang ada, sehingga dalam mengimplementasikannya tidak boleh dengan mengatasnamakan nilai-nilai demokrasi tetapi menimbulkan disintegrasi bangsa, atau konflik SARA.

Pemilu secara berkesinambungan, sebagai implementasi dari kesadaran bahwa sumber legitimasi kekuasaan politik bukan lagi dari atas, melainkan dari bawah (rakyat), maka rakyatlah yang punya kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya.

Penghargaan HAM serta perlindungan hak-hak minoritas, demokrasi Pancasila merujuk kepada prinsip *humanism-religious*, sehingga demokrasi tidak akan berarti apa-apa tanpa dijiwai oleh HAM, tentu bertolak pada hakekat manusia yang *monopluralis*, yang berbeda dengan konsep manusia model *liberalis* maupun *sosialis-komunis*.

Kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Disinilah salah satu cirri pembeda (*differentia specipica*) dengan demokrasi Barat, bahwa demokrasi Pancasila dalam menyelesaikan masalah dengan melalui kompetisi ide-ide, sehingga keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan berdasarkan ide yang paling baik dengan melalui musyawarah mufakat.

Partai Politik, memang partai politik merupakan sokoguru demokrasi, namun bukan berarti semakin banyak partai politik semakin sempurna demokrasi, bagi bangsa

Indonesia yang heterogen terlalu banyak partai politik justru akan kontra produktif, mengingat demokrasi Pancasila lebih cenderung bersifat kualitatif.

Dengan demikian demokrasi Pancasila, menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara.

Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam mengambil keputusan, melainkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan dari semua pihak yang terkait, oleh karena itu prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak lain.

Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila merupakan jawaban yang memang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil bukan dipaksakan. Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik sebagaimana telah terungkap diatas, melainkan juga demokrasi dalam bidang ekonomi maupun sosial-budaya.

Demokrasi di Bidang Ekonomi

Rakyat menjadi subyek dalam pembangunan ekonomi, artinya pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan, dalam hal implementasinya merujuk pada 3 dimensi. Pertama dimensi teleologis, yakni sesuai dengan tujuan dibentuknya negara ini, oleh karena itu pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bentuk hegemoni kekayaan alam oleh pihak-pihak tertentu harus ditolak. Rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan dan menikmati kekayaan negara.

Kedua dimensi etis, yakni rakyat sebagai pusat perhatian, bahwa disamping sebagai subyek (pelaku pembangunan ekonomi) juga sebagai obyek (tujuan pembangunan ekonomi tersebut)

Ketiga dimensi integratif, artinya rakyat disamping sebagai individu juga sebagai bagian dari masyarakat, oleh karenanya sebagai pelaku ekonomi juga harus memikirkan kepentingan pihak lain (masyarakat).

Bidang Kebudayaan Nasional

Istilah budaya nasional, tidak berarti menghilangkan unsur-unsur budaya daerah, melainkan budaya daerah tetap eksis dan diberi fasilitas untuk berkembang, disinilah kewajiban negara memberi sarana baik perangkat lunak maupun keras. Perangkat lunak dapat berupa undang-undang, sedang perangkat keras berupa sarana fisik, dalam rangka mendorong tumbuhkembangnya budaya lokal.

Mengingat dalam nilai budaya terkandung bentuk strategi manusia dalam menjawab tantangan dari lingkungannya, oleh karena itu keanekaragaman budaya bangsa mencerminkan kekayaan suatu bangsa dalam memiliki strategi menghadapi tantangan hidup, sehingga pada gilirannya akan melahirkan bangsa yang senantiasa *survive* dalam menghadapi segala macam tantangan global.

Simpulan

Setiap bangsa memiliki wawasan (cara pandang) terhadap diri dan lingkungannya, demikian juga bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap dirinya maupun lingkungannya. Terhadap dirinya, bangsa Indonesia memandang bahwa wilayah Indonesia adalah kepulauan, dan bangsa Indonesia adalah heterogen. Sebagai negara kepulauan (wilayahnya) yang heterogen (bangsanya), Pancasila sebagai sarana perekat dan Bhineka Tunggal Ika sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaannya.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup bangsa yang wilayahnya kepulauan dan bangsanya heterogen. Pancasila merupakan ruang yang nyaman bagi berkembangnya keanekaragaman (heterogenitas) dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis kesadaran identitas bangsa yang menempati ruang Pancasila.

Implementasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang berupa hukum positif tidak akan bermanfaat tanpa dikuti oleh penegakan hukum. Suatu norma, nilai, aturan, hukum baru berguna jika ada penegakan hukum, dan hal ini akan tercipta jika penegak hukum berwibawa.

Heterogenitas adalah *de facto* dan demokrasi Pancasila adalah solusi dan ruang dalam mengembangkan heterogenitas dan BhinekaTunggal Ika adalah jiwa yang mendorong perkembangan demokrasi Pancasila.

Daftar Pustaka

- As'ad Said Ali, 2010, *Negara Pancasila Jalan Kemasalahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Ideologi Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Khaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yoyakarta.
- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Salim, Emil, 1979, *Sistem Ekonomi Pancasila*, LP3ES, Jakarta.
- Wahyudi, Agus, 2006, *Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politik?* Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinis (eds). *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, FISIP UI, Depok, Jakarta.